

**ANALISIS DAMPAK PEMBERIAN DANA  
PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA  
PEDESAAN (DPM-LUEP) TERHADAP PETANI  
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**TESIS**



**Oleh**

**M. AZHAR HARAHAHAP**

**NIM 041802022**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2006**

**ANALISIS DAMPAK PEMBERIAN DANA  
PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA  
PEDESAAN (DPM-LUEP) TERHADAP PETANI  
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**T E S I S**

Untuk Memperoleh Gelar Magister Manajemen Agribisnis (MMA)  
Pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Agribisnis Universitas Medan Area



Oleh

**M. AZHAR HARAHAP**

**NIM 041802022**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2006**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL : ANALISIS DAMPAK PEMBERIAN DANA  
PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA  
PEDESAAN (DPM-LUEP) TERHADAP PETANI DI  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**NAMA : M. AZHAR HARAHAHAP  
NPM : 041802022**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar, MS**

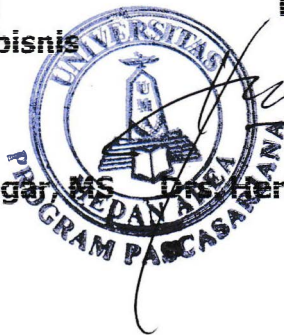
  
**Ir. Abdul Rahman, MS**

**Ketua Program Studi  
Magister Manajemen Agribisnis**

**Direktur**

  
**Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar, MS**

  
**Heri Kusmanto, MA**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen Agribisnis Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan disingkat (DPM-LUEP) adalah suatu pemberian "*bridging fund*" atau "dana talangan" kepada LUEP agar kemampuan pembiayaan mereka bertambah untuk membeli gabah/beras petani pada saat panen raya yang mengacu kepada kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Untuk itu diperlukan kajian pengaruh pemberian DPM-LUEP terhadap produktivitas petani, pendapatan dan stabilitas harga.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar, MS, Ketua Program Studi MMA Pascasarjana UMA yang sekaligus sebagai pembimbing I atas bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan dan penyelesaian tesis.

2. Ir Abdul Rahman, MS sebagai pembimbing II atas bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan dan penyelesaian tesis.
3. Seluruh staf pangajar dan pegawai pada Program Pascasarjana UMA yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama kuliah di Progam Studi MMA Pascasarjana UMA.
4. Istri tercinta serta putera-puteri kami yang memberikan dorongan, motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan dengan baik.
5. Rekan-rekan staf Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Mandailing Natal yang telah banyak membantu dan memberikan semangat untuk penyelesaian tesis ini.
6. Teman-teman angkatan II Program Studi MMA Pascasarjana UMA dan kepada semua pihak yang telah membantu sampai selesainya penulisan tesis ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembangunan pertanian di Indonesia.

Medan, Juli 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
Latar Belakang .....	1
Perumusan Masalah .....	5
Tujuan Penelitian .....	6
Manfaat Penelitian .....	7
Hipotesis .....	7
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
Pemberdayaan Petani .....	8
Kerawanan Pangan .....	11
Kerangka Pikiran .....	16
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	19
Tempat dan Waktu .....	19
Metode Pengambilan Sampel .....	19
Data dan Sumber Data .....	20
Metode Analisis Data .....	20
Gambaran Umum Pemberian dan Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan Di Kabupaten Mandailing Natal .....	24
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	46
<b>LAMPIRAN</b> .....	49



## **RINGKASAN**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kesediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya, masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi.

Setelah pernah mencapai swasembada beras pada tahun 80-an, ternyata ketahanan pangan Indonesia terus mengalami penurunan. Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektifitas dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program yang dilaksanakan pemerintah dan mengapa berbagai program tersebut justru semakin menimbulkan kerawanan pangan dan bukannya ketahanan pangan.

Seiring dengan proses otonomi daerah yang tengah berjalan, beberapa Provinsi dan Kabupaten telah melaksanakan pengamanan stabilitas harga gabah/beras di wilayahnya, dengan menggunakan dana APBD untuk pengadaan gabah/beras petani pada saat panen raya. Upaya ini ternyata dapat menurunkan fluktuasi harga, meningkatkan kemampuan daerah dalam pengamanan ketersediaan pangan, dan meningkatkan pendapatan petani padi di wilayahnya.

Berdasarkan pengalaman dan keberhasilan daerah lain dalam melaksanakan program stabilitasi harga gabah/beras di daerah, sejak tahun 2003 hingga kini Departemen Pertanian melalui Badan Bimas Ketahanan Pangan mengembangkan suatu kegiatan berupa pengembangan model pemanfaatan Dana Penguatan Modal Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian gabah/beras petani. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dipandang sebagai suatu pemberian "Dana Talangan" kepada LUEP agar kemampuan pembiayaan mereka bertambah untuk membeli gabah/beras petani pada saat panen raya, pada tingkat yang wajar mengacu pada kebijakan HPP.

Tujuan penelitian adalah melakukan kajian terhadap : (1) Untuk mengetahui dampak pemberian DPM-LUEP terhadap tingkat ketersediaan dan harga gabah di Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan salah satu daerah rawan pangan di Provinsi Sumatera Utara, (2) Untuk mengetahui sejauhmana perbedaan tingkat pendapatan petani pada LUEP penerima DPM-LUEP dengan petani pada LUEP yang tidak menerima DPM-LUEP dan (3) Untuk mengetahui apakah ada penurunan tingkat kerawanan pangan sesudah pemberian DPM-LUEP.

Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian Gabah petani di Provinsi Sumatera Utara sama halnya di Kabupaten Mandailing Natal bersifat stimulan sehingga diharapkan dapat mendorong daerah-daerah yang surplus beras agar mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan pembelian Gabah petani seperti APBN. Kegiatan ini akan bersinergi dengan kegiatan lainnya seperti kegiatan lumbung desa modern, sistem tunda jual Gabah, dan pengadaan Gabah dalam negeri oleh Dolog.



Sasaran wilayah DPM-LUEP di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2003 adalah Kecamatan dengan sasaran penerima DPM-LUEP sebanyak 9 LUEP. Pada tahun 2004 sasaran wilayah DPM-LUEP menjadi Kecamatan dengan sasaran penerima DPM-LUEP sebanyak 12 LUEP. Namun pada tahun 2005 DPM-LUEP di Kabupaten Mandailing Natal tidak terjadi realisasi kendatipun telah diberikan target penerimaan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas petani setelah dana LUEP (tahun 2004/2005) dikururkan adalah 6.550 ton GKP per ha, sedangkan sebelum dana LUEP dikururkan (tahun 2003) rata-rata produktivitas petani adalah 5.768 ton GKP per ha. Rata-rata pendapatan petani setelah dana LUEP dikururkan adalah Rp 1,858,893,- dan sebelum dana LUEP dikururkan rata-rata pendapatan adalah Rp 1,291,761,-. Program DPM-LUEP juga secara nyata meningkatkan harga di tingkat petani dan dapat menjaga stabilisasi harga.

Pendapatan petani setelah program DPM-LUEP dipengaruhi oleh faktor produktivitas dan harga di tingkat petani dan mempunyai korelasi yang cukup tinggi (81.10%) dibandingkan sebelum program DPM-LUEP diluncurkan. Dengan demikian, program DPM-LUEP dapat meningkatkan pendapatan petani, produktivitas dan menjaga stabilisasi harga di tingkat petani.

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Selama ini sektor pertanian plus pertambangan dan industri pengolahan produk pertanian (agroindustri) adalah merupakan sektor yang mempunyai kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sejak tahun 1995-1997 dan bahkan berdasarkan prediksi untuk tahun 1998-2000 sektor pertanian, pertambangan dan agroindustri adalah merupakan sektor-sektor yang paling besar kontribusinya terhadap PDB Indonesia dengan besar rata-rata per tahun sekitar 50%.

Apa yang terjadi dengan *marketed surplus of food* dalam hubungannya dengan *agricultural term of trade*, perlu disikapi dengan serius. Jika terjadi surplus pertanian maka harga pangan turun dan pada akhirnya dapat menyebabkan petani pindah ke sektor industri. Sehingga sektor industri harus memproduksi barang dengan murah, karena daya beli yang rendah. Bagi masyarakat perkotaan yang bekerja memerlukan produk pangan murah.

Perekonomian Indonesia dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir telah mengalami perubahan struktural yang dominan dari sektor pertanian ke sektor industri sehingga menyebabkan menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap *Gross National Product* (GNP). Meskipun secara relatif kontribusinya menurun, namun secara nominal

kontribusi sektor pertanian masih sangat besar. Pentingnya sektor pertanian dikarenakan sebagian besar kontribusi industri pengolahan adalah industri pengolahan yang berbasis pada pertanian (agroindustri).

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan, bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kesediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya, masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi.

Setelah pernah mencapai swasembada beras pada tahun 80-an, ternyata ketahanan pangan Indonesia terus mengalami penurunan. Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektifitas dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program yang dilaksanakan pemerintah dan mengapa berbagai program tersebut justru semakin menimbulkan kerawanan pangan dan bukannya ketahanan pangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus, 1998. **Indonesia Dalam Angka**, Badan Pusat Statistik Pusat, Jakarta.
- Anonimus, 2001. **Pedoman Umum Kredit Usaha Tani**, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Anonimus, 2003. **Evaluasi Program Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara tahun 2003**, Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara, Medan.
- Anonimus, 2003 **Petunjuk Pelaksanaan DPM-LUEP Tahun Anggaran 2003 Propinsi Sumatera Utara**, Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara, Medan.
- Anonimus, 2003 **Pedoman Umum DPM-LUEP**, Badan Bimas Ketahanan Pangan, Jakarta.
- Anonimus, 2005, **Petunjuk Teknis Penentuan Tingkat Kerawanan Pangan**, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Medan.
- Anonimus, 1996. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Baharsyah, S. 1995, **50 Tahun Membangun Pertanian Modern Indonesia : Refleksi, Tantangan dan Prospek**, Pidato Ilmiah Dalam Menyambut Dies Natalis IPB Bogor ke-32, Bogor.
- Badan Pusat Statistik, 2002. **Statistik Nilai Tukar Petani di Indonesia**, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Daniel, Dominick, 2001. **Managerial Economics dalam Perekonomian Global**, Erlangga, Jakarta.
- Daniel, Dominick, 2002. **Ekonomi Pembangunan Pertanian**, Erlangga, Jakarta.
- Departemen Pertanian, 2002. **Kegiatan Lembaga Pelayanan Jasa Keuangan Kredit Usaha Mandiri**, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor.

Dewan Ketahanan Pangan, 2005, **Peta Kerawanan Pangan Indonesia**, Jakarta

-----, 2003. **Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu**, Bogor.

Leman, A.G. 1995. Mengelola Dana Pinjaman Secara Efisien. Balai Pustaka, Jakarta.

Leman, Freddy, 1995. **Managemen Agribisnis**, Erlangga, Jakarta.

Martodireso, S, dan Suryatno, W.A, 2003. Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama, Kanisius, Yogyakarta.

Mubyarto dan Hamid, E.S., 1990. Kredit Pedesaan di Indonesia. BPEE, Yogyakarta.

Rahardi, 2003. **Modal Usaha Tani**, Pustaka, Bandung.

Rahardi, F., 2003. Cerdas Beragribisnis, AgroMedia Pustaka, Jakarta.

Saragih, Bungaran, 2001. **Suara dari Bogor Membangun Sistem Agribisnis**, PT. Loji Grafika Griya Sarana, Jakarta.

Subiyakto, 1993. **Agribisnis berbasis Padi Sawah**, PT. Loji Grafika Griya Sarana, Jakarta.

Subyakto, 1993. Ekonomi Koperasi, Liberti, Jakarta.

Suyatno, T, Chalik, H.A, Sukada, M, Ananda, T.Y, Marala, D.T., 1999. Dasar-dasar Perkreditan, Edisi Keempat. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Walpole, R.E., 1993, Pengantar Statistika, Edisi ke – 3, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.